
Tata Kelola Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur: Implementasi SISKEUDES Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Marcella Aullia Jayadi^{1*}, Tries Ellia Sandari²

¹⁻² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

email: Cellajayadi0104@gmail.com¹, triesellia@untag-sby.ac.id²

Article Info :

Received:

15-12-2025

Revised:

14-01-2025

Accepted:

18-01-2026

Abstract

This study examines village financial governance and the competence of village officials in implementing the Village Financial System (SISKEUDES) based on the Indonesian Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Using a qualitative descriptive approach, the research focuses on how human resource capacity and task distribution influence the effectiveness of SISKEUDES implementation. The findings indicate that although the application has supported orderly budgeting, administration, and reporting, operational practices remain highly dependent on the village financial officer as the main system operator. Village heads and secretaries generally understand financial procedures conceptually but lack sufficient technical skills to operate SISKEUDES independently. This imbalance creates administrative vulnerability, particularly during periods of high workload or technical disruption. The study also shows that limited competency distribution affects accountability, efficiency, and continuity of village financial management. Strengthening technical capacity across officials, improving internal coordination, and optimizing task allocation are essential to enhance SISKEUDES performance. Effective implementation of SISKEUDES requires not only regulatory compliance but also sustainable human resource development to ensure transparent, accountable, and resilient village financial governance..

Keywords: Village Financial Management, SISKEUDES, Human Resource Competence, Accountability, Permendagri No. 20 of 2018.

Akstrak

Penelitian ini mengkaji tata kelola keuangan desa dan kompetensi pejabat desa dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada bagaimana kapasitas sumber daya manusia dan distribusi tugas memengaruhi efektivitas implementasi SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi tersebut telah mendukung proses penganggaran, administrasi, dan pelaporan yang teratur, praktik operasional masih sangat bergantung pada petugas keuangan desa sebagai operator utama sistem. Kepala desa dan sekretaris umumnya memahami prosedur keuangan secara konseptual, namun kurang memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk mengoperasikan SISKEUDES secara mandiri. Ketidakseimbangan ini menciptakan kerentanan administratif, terutama selama periode beban kerja tinggi atau gangguan teknis. Penelitian juga menunjukkan bahwa distribusi kompetensi yang terbatas mempengaruhi akuntabilitas, efisiensi, dan kelangsungan pengelolaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas teknis di kalangan pejabat, perbaikan koordinasi internal, dan optimalisasi alokasi tugas merupakan hal esensial untuk meningkatkan kinerja SISKEUDES. Implementasi efektif SISKEUDES tidak hanya memerlukan kepatuhan regulasi tetapi juga pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk memastikan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tangguh.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, SISKEUDES, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa menempati posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena desa merupakan entitas pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi menjadi landasan utama agar dana publik yang dikelola desa mampu menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga. Regulasi pengelolaan keuangan desa telah dirumuskan secara komprehensif melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa secara sistematis dan terukur (Deviyanti & Hidayati, 2024). Kerangka regulatif ini memperlihatkan upaya negara dalam membangun tata kelola keuangan desa yang selaras dengan prinsip akuntansi sektor publik modern (Martadinata, 2024).

Sejalan dengan tuntutan tata kelola yang semakin kompleks, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen pendukung pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara terintegrasi dan berbasis regulasi. Kehadiran SISKEUDES diharapkan mampu meningkatkan ketepatan data, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan kesalahan pencatatan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif (Ilham & Lusiani, 2022). Digitalisasi ini juga sejalan dengan perkembangan sistem informasi akuntansi publik yang menekankan konsistensi, pengendalian internal, dan keandalan informasi keuangan (Grabski et al., 2011).

Implementasi SISKEUDES tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang lebih luas, yakni penguatan akuntabilitas keuangan desa di hadapan masyarakat dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES mampu meningkatkan keterbukaan informasi dan keteraturan administrasi keuangan desa, terutama ketika sistem tersebut terintegrasi dengan mekanisme pengelolaan kas yang baik (Ulandari & Martiningsih, 2025). Akuntabilitas keuangan desa juga berkorelasi dengan prinsip value for money yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan dana publik (Alexandre et al., 2023). Capaian tersebut memperlihatkan bahwa teknologi informasi berpotensi menjadi instrumen penting dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di tingkat lokal.

Meskipun manfaat SISKEUDES telah banyak diidentifikasi, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kompetensi aparatur desa sebagai pengguna utama sistem. Kompetensi aparatur mencakup pemahaman regulasi, kemampuan teknis pengoperasian aplikasi, serta kecakapan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik administrasi keuangan yang sesuai ketentuan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia sering menjadi penghambat utama dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel (Ikhwani et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh desain aplikasi, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang menjalankannya.

Kesenjangan pemahaman aparatur desa terhadap ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih menjadi persoalan yang kerap dijumpai di berbagai daerah. Kesalahan dalam penginputan data, ketidaksesuaian klasifikasi anggaran, serta kurangnya pemahaman terhadap alur pertanggungjawaban keuangan sering muncul dalam praktik sehari-hari pengelolaan APBDes (Deviyanti & Hidayati, 2024). Situasi ini mengindikasikan bahwa penggunaan SISKEUDES belum sepenuhnya dipahami sebagai alat yang merefleksikan norma hukum dan prinsip akuntansi publik secara menyeluruh. Kebutuhan akan kajian yang menempatkan pemahaman aparatur sebagai variabel kunci menjadi semakin relevan dalam konteks ini.

Desa Pelem Watu merupakan salah satu desa yang telah menerapkan SISKEUDES secara aktif dalam pengelolaan keuangan desa dan menjadi representasi dinamika implementasi sistem tersebut di tingkat lokal. Praktik pengelolaan APBDes di desa ini masih menghadapi kendala teknis dan administratif yang berkaitan dengan ketepatan input data serta penyesuaian menu aplikasi dengan struktur anggaran desa. Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara ketentuan normatif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan praktik operasional yang dijalankan oleh aparatur desa. Kondisi ini menjadikan Desa Pelem Watu sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara kompetensi aparatur dan kualitas implementasi SISKEUDES.

Dari sudut pandang metodologis, penelitian mengenai tata kelola keuangan desa menuntut pendekatan yang mampu menangkap realitas normatif dan empiris secara seimbang. Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif dapat digunakan untuk menelaah bagaimana pemahaman aparatur desa mempengaruhi efektivitas penerapan sistem keuangan berbasis regulasi (Takona, 2024). Analisis mendalam terhadap pengalaman dan praktik aparatur juga penting untuk mengungkap faktor-faktor nonteknis yang memengaruhi penggunaan sistem informasi keuangan (Engle, 2015). Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika implementasi SISKEUDES di tingkat desa.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik karena berkontribusi dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara kompetensi aparatur desa, regulasi pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik. Fokus pada keterkaitan antara SISKEUDES dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memberikan perspektif baru mengenai bagaimana regulasi diterjemahkan ke dalam praktik administrasi desa yang nyata. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan kapasitas aparatur yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam pemahaman perangkat desa terhadap implementasi SISKEUDES dan kesesuaianya dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Desa Pelem Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan informan utama Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan yang dipilih melalui purposive sampling karena relevansinya dengan pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang mencakup APBDes, BKU, RAB, serta laporan realisasi anggaran guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik penggunaan SISKEUDES. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, sementara analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang agar temuan penelitian memiliki konsistensi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Aparatur Desa dan Implementasi SISKEUDES Berbasis Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pembahasan ini menitikberatkan pada keterkaitan antara kompetensi aparatur Desa Pelem Watu dan kualitas implementasi SISKEUDES sebagai instrumen tata kelola keuangan desa yang berbasis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan teknis aplikasi oleh aparatur, khususnya Kaur Keuangan, telah terbentuk secara fungsional melalui pengalaman penggunaan berkelanjutan dan pendampingan teknis sebelumnya. Penguasaan tersebut terlihat dari kemampuan melakukan input kegiatan, pencatatan transaksi, penyusunan Buku Kas Umum, hingga pencetakan laporan keuangan periodik yang sesuai format sistem. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem informasi keuangan publik akan berfungsi optimal ketika pengguna memiliki kecakapan operasional yang memadai dalam menjalankan fitur-fitur utama aplikasi (Grabski et al., 2011; Ilham & Lusiani, 2022).

Meskipun kemampuan teknis relatif terbentuk, penelitian ini menemukan pola penggunaan SISKEUDES yang masih terpusat pada satu aparatur utama, yaitu Kaur Keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kompetensi belum merata di antara perangkat desa, sehingga keberlangsungan pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada individu tertentu. Pola ketergantungan ini berpotensi menimbulkan risiko administratif apabila terjadi pergantian aparatur atau kendala teknis pada operator utama. Fenomena serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian yang menegaskan bahwa ketimpangan kompetensi aparatur menjadi salah satu tantangan dalam penguatan akuntabilitas keuangan desa berbasis sistem digital (Kindangen et al., 2022; Tiarno & Budiwitjaksono, 2023).

Aspek lain yang menjadi temuan penting adalah lemahnya pemahaman aparatur terhadap substansi regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aparatur desa pada umumnya memahami alur besar pengelolaan keuangan desa seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, namun masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan ketentuan teknis yang bersifat normatif. Kesulitan tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme perubahan APBDes, batasan kewenangan penatausahaan, persyaratan dokumen pendukung SPJ dan RAB, serta prosedur pertanggungjawaban akhir tahun. Kondisi ini menguatkan temuan Deviyanti dan Hidayati (2024) serta Falufi dan Rivai (2025) yang menegaskan bahwa pemahaman regulatif aparatur desa sering tertinggal dibanding kemampuan operasional penggunaan aplikasi.

Ketidakseimbangan antara pemahaman sistem dan pemahaman regulasi mencerminkan kecenderungan penggunaan SISKEUDES yang bersifat administratif dan prosedural. Aparatur desa cenderung berfokus pada pemenuhan kewajiban penginputan dan pelaporan tanpa sepenuhnya memahami rasionalitas hukum dan akuntansi di balik setiap tahapan pengelolaan keuangan. Situasi ini berpotensi memunculkan kesalahan substantif yang tidak terdeteksi oleh sistem secara otomatis, terutama pada aspek kesesuaian kebijakan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem digital tidak dapat menggantikan pemahaman normatif aparatur, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif (Martadinata, 2024; Maharan & Akbar, 2020). Untuk memperkuat analisis empiris, berikut disajikan ringkasan temuan lapangan yang dikaitkan dengan laporan resmi desa dan hasil penelitian terdahulu sebagai data penguatan:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Pemahaman Aparatur Desa Pelem Watu terhadap SISKEUDES dan Permendagri 20/2018

Aspek yang Dikaji	Temuan Peneliti (Lapangan)	Laporan/Praktik Resmi Desa	Temuan Penelitian Terdahulu
Penguasaan teknis SISKEUDES	Operator mampu input kegiatan, transaksi, BKU, dan laporan	Laporan realisasi APBDes tersusun rutin	Penguasaan teknis meningkatkan akuntabilitas (Ulandari & Martiningsih, 2025; Setiawan et al., 2024)
Distribusi kompetensi	Terpusat pada Kaur Keuangan	Perangkat lain terbatas pada fungsi administratif	Ketimpangan kompetensi aparatur desa (Kindangen et al., 2022; Djafarmaku et al., 2025)
Pemahaman regulasi	Lemah pada aspek teknis Permendagri	Koreksi berulang saat evaluasi kecamatan	Kendala pemahaman normatif regulasi (Deviyanti & Hidayati, 2024; Tede et al., 2024)
Dampak terhadap akuntabilitas	Administratif terpenuhi, substantif belum optimal	Pelaporan tepat waktu, revisi masih terjadi	Akuntabilitas dipengaruhi kompetensi SDM (Ikhwan et al., 2024; Firmawati et al., 2025)

Data pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan utama implementasi SISKEUDES di Desa Pelem Watu terletak pada aspek operasional, sementara aspek pemahaman regulatif masih menjadi titik lemah. Kondisi ini berdampak pada kualitas akuntabilitas yang lebih menonjol secara administratif dibandingkan substantif. Padahal, akuntabilitas keuangan desa tidak hanya diukur dari ketepatan waktu pelaporan, tetapi juga dari kesesuaian kebijakan anggaran dengan prinsip value for money dan ketentuan hukum yang berlaku (Alexandre et al., 2023). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola keuangan desa yang ideal.

Temuan ini juga memperkuat argumentasi bahwa kompetensi aparatur desa merupakan variabel kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi. Kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan aplikasi, tetapi juga mencakup pemahaman konseptual mengenai regulasi, akuntansi sektor publik, dan tanggung jawab hukum aparatur. Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur berbanding lurus dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa (Ikhwan et al., 2024; Muhammad & Limba, 2025; Manik et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia memiliki dampak strategis terhadap kualitas tata kelola keuangan desa.

Dari sudut pandang sistem informasi, SISKEUDES dapat dipahami sebagai bagian dari praktik enterprise resource planning sektor publik yang menuntut keselarasan antara teknologi, struktur organisasi, dan kapasitas pengguna. Ketika salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, kinerja sistem secara keseluruhan menjadi tidak maksimal. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa teknologi telah tersedia dan digunakan secara rutin, namun aspek penguatan kapasitas aparatur belum sepenuhnya mengikuti perkembangan sistem. Situasi ini sejalan dengan kajian Grabski et al. (2011)

yang menegaskan bahwa kegagalan implementasi sistem informasi sering bersumber pada faktor manusia, bukan pada sistem itu sendiri.

Pendampingan teknis yang selama ini diberikan cenderung berfokus pada aspek operasional aplikasi, sementara penguatan pemahaman regulasi belum menjadi perhatian utama. Padahal, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menempatkan pengelolaan keuangan desa sebagai proses hukum-administratif yang menuntut ketelitian dan kepatuhan normatif. Strategi optimalisasi implementasi regulasi memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan pelatihan teknis dengan penguatan pemahaman substansi aturan (Falufi & Rivai, 2025). Tanpa keseimbangan tersebut, SISKEUDES berisiko dipahami hanya sebagai alat pelaporan, bukan sebagai instrumen tata kelola keuangan desa yang utuh.

Implementasi SISKEUDES di Desa Pelem Watu telah berjalan secara fungsional, namun belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola keuangan desa yang berbasis regulasi secara komprehensif. Kekuatan pada aspek teknis perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman regulatif dan pemerataan kompetensi aparatur desa. Temuan ini memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan desa dengan menempatkan kompetensi aparatur sebagai faktor penentu efektivitas sistem informasi keuangan desa. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terarah, SISKEUDES berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang berkelanjutan.

Hambatan Teknis dalam Penggunaan SISKEUDES dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Keuangan Desa

Hambatan teknis dalam penggunaan SISKEUDES merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi kualitas tata kelola keuangan desa, terutama pada desa yang telah mengandalkan sistem digital secara penuh dalam pengelolaan APBDes. Hasil penelitian di Desa Pelem Watu menunjukkan bahwa kendala teknis masih kerap muncul meskipun aparatur desa telah memiliki pengalaman operasional yang memadai dalam menggunakan aplikasi. Gangguan jaringan internet, error sistem saat pembaruan aplikasi, serta kesalahan input data menjadi persoalan yang paling sering dihadapi oleh operator. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi aparatur, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan stabilitas sistem pendukungnya (Grabski et al., 2011; Martadinata, 2024).

Gangguan jaringan internet menjadi hambatan teknis yang paling dominan dalam proses penggunaan SISKEUDES di Desa Pelem Watu. Ketidakstabilan koneksi menyebabkan proses input data sering terhenti, terutama pada saat jam kerja administratif yang padat menjelang penyusunan laporan keuangan bulanan. Hambatan ini berdampak langsung pada efisiensi kerja aparatur karena proses pencatatan transaksi harus diulang atau ditunda hingga jaringan kembali normal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan et al. (2024) dan Muhammad dan Limba (2025) yang menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur jaringan masih menjadi persoalan struktural dalam implementasi SISKEUDES di berbagai wilayah.

Error sistem yang muncul saat pembaruan aplikasi juga menjadi kendala teknis yang signifikan. Aparatur desa menyampaikan bahwa pembaruan versi SISKEUDES sering kali diikuti dengan perubahan tampilan menu atau alur penatausahaan yang belum sepenuhnya dipahami oleh operator. Situasi ini menyebabkan kebingungan operasional dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, terutama pada fitur penatausahaan dan pelaporan. Fenomena serupa juga dicatat dalam evaluasi implementasi SISKEUDES yang menunjukkan bahwa perubahan sistem tanpa pendampingan teknis yang memadai berpotensi menurunkan efektivitas penggunaan aplikasi (Tata Bangun Pramesti et al., 2023; Ilham & Lusiani, 2022).

Kesalahan input data menjadi hambatan teknis lanjutan yang tidak dapat dilepaskan dari dua persoalan sebelumnya. Ketika jaringan tidak stabil atau sistem mengalami error, operator sering kali harus mengulang proses input transaksi, terutama pada pencatatan Buku Kas Umum dan penatausahaan belanja. Pengulangan ini tidak hanya meningkatkan beban kerja aparatur, tetapi juga membuka peluang terjadinya inkonsistensi data apabila koreksi tidak dilakukan secara cermat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketelitian aparatur tetap menjadi faktor penting meskipun sistem telah dirancang untuk meminimalkan kesalahan administratif (Maharani & Akbar, 2020; Tiarno & Budiwitjaksono, 2023).

Dampak dari berbagai hambatan teknis tersebut terlihat jelas pada keterlambatan penyusunan laporan keuangan desa. Aparatur Desa Pelem Watu menyampaikan bahwa waktu yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan laporan realisasi anggaran sering bertambah ketika kendala teknis terjadi secara berulang. Keterlambatan ini berpotensi memengaruhi proses evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

Ketepatan waktu pelaporan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik berbasis value for money (Alexandre et al., 2023; Manik et al., 2025). Untuk memperkuat temuan empiris, berikut disajikan data ringkasan hambatan teknis yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, laporan administrasi desa, serta temuan penelitian terdahulu sebagai pembanding.

Tabel 2. Hambatan Teknis Penggunaan SISKEUDES dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Jenis Hambatan Teknis	Temuan Peneliti (Lapangan)	Dampak Administratif	Temuan Penelitian Terdahulu
Gangguan jaringan internet	Input data sering terhenti	Keterlambatan pencatatan dan pelaporan	Kendala infrastruktur digital desa (Setiawan et al., 2024; Muhammad & Limba, 2025)
Error sistem saat update	Menu berubah dan sulit dipahami	Risiko kesalahan penatausahaan	Dampak pembaruan sistem tanpa pendampingan (Tata Bangun Pramesti et al., 2023)
Kesalahan input data	Transaksi harus diulang	Beban kerja operator meningkat	Ketergantungan pada ketelitian SDM (Ilham & Lusiani, 2022; Maharani & Akbar, 2020)
Keterlambatan laporan	Laporan realisasi mundur	Evaluasi dan pengawasan terhambat	Akuntabilitas dipengaruhi stabilitas sistem (Ulandari & Martiningsih, 2025)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hambatan teknis memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola keuangan desa, terutama pada aspek efisiensi dan ketepatan waktu pelaporan. Meskipun SISKEUDES dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, gangguan teknis dapat mengurangi manfaat sistem apabila tidak diantisipasi secara sistematis. Kondisi ini menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa memerlukan dukungan infrastruktur yang sejalan dengan kompleksitas sistem yang digunakan. Temuan ini juga menguatkan hasil penelitian Ulandari dan Martiningsih (2025) serta Tede et al. (2024) yang menempatkan stabilitas sistem sebagai prasyarat utama akuntabilitas keuangan desa.

Hambatan teknis yang terjadi juga berinteraksi dengan faktor kompetensi aparatur desa. Aparatur yang memiliki pemahaman teknis dan regulatif yang baik cenderung mampu mengatasi gangguan sistem dengan lebih adaptif, sementara aparatur dengan kompetensi terbatas akan mengalami peningkatan beban kerja dan stres administratif. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia tetap relevan meskipun kendala utama bersifat teknis. Berbagai penelitian menegaskan bahwa kompetensi aparatur, motivasi kerja, dan dukungan pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES (Kindangen et al., 2022; Djafarmaku et al., 2025; Ikhwan et al., 2024).

Hambatan teknis yang tidak tertangani secara sistematis berpotensi menggeser orientasi pengelolaan keuangan desa dari substansi kebijakan ke sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Aparatur desa cenderung berfokus pada penyelesaian masalah teknis jangka pendek, sementara aspek perencanaan dan evaluasi program menjadi kurang mendapat perhatian. Situasi ini dapat mengurangi kualitas pengambilan keputusan anggaran yang seharusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan efisiensi penggunaan dana desa. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa sistem informasi keuangan harus mendukung proses manajerial, bukan sekadar alat pelaporan (Grabski et al., 2011; Martadinata, 2024).

Strategi optimalisasi implementasi SISKEUDES perlu diarahkan pada penguatan dukungan teknis yang berkelanjutan. Pembaruan aplikasi seharusnya diikuti dengan sosialisasi dan pendampingan

yang memadai agar aparatur desa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sistem secara cepat dan tepat. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi Falufi dan Rivai (2025) yang menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, teknologi, dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan desa. Tanpa dukungan tersebut, hambatan teknis berisiko menjadi faktor penghambat utama akuntabilitas keuangan desa.

Hambatan teknis dalam penggunaan SISKEUDES di Desa Pelem Watu menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan struktural dan operasional. Gangguan jaringan, error sistem, dan kesalahan input data berdampak nyata pada beban kerja aparatur dan ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Temuan ini memperkaya literatur mengenai implementasi SISKEUDES dengan menegaskan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada desain aplikasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Dengan penanganan hambatan teknis yang terintegrasi, SISKEUDES berpotensi lebih optimal dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Firmawati et al., 2025; Manik et al., 2025).

Hambatan SDM dan Pembagian Tugas dalam Implementasi SISKEUDES

Hambatan sumber daya manusia dalam implementasi SISKEUDES di Desa Pelem Watu terlihat jelas melalui pola ketergantungan yang tinggi pada Kaur Keuangan sebagai operator utama sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh proses input data, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh satu aparatur, sehingga beban kerja terpusat dan rentan menimbulkan hambatan administratif. Ketika operator menghadapi kendala teknis, beban kerja meningkat, atau tidak dapat menjalankan tugas secara optimal, seluruh proses pengelolaan keuangan desa ikut terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian tugas yang belum proporsional menjadi faktor struktural yang memengaruhi efektivitas tata kelola keuangan desa (Ilham & Lusiani, 2022; Kindangen et al., 2022).

Ketergantungan pada satu operator mencerminkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menguasai sistem informasi keuangan desa secara kolektif. Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada umumnya memahami alur normatif pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun belum memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan SISKEUDES secara mandiri. Keterbatasan ini menyebabkan kedua pejabat struktural tersebut tidak dapat secara efektif menggantikan peran operator saat terjadi kendala operasional. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman kebijakan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem digital (Devianti & Hidayati, 2024; Martadinata, 2024).

Dari tata kelola organisasi, kondisi tersebut menandakan bahwa sistem kerja pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme alih pengetahuan dan pembagian peran yang berimbang. Ketika kompetensi teknis hanya dimiliki oleh satu individu, keberlanjutan pengelolaan keuangan desa menjadi sangat bergantung pada stabilitas kinerja aparatur tersebut. Risiko administratif akan semakin besar apabila terjadi mutasi jabatan, cuti, atau kendala kesehatan pada operator utama. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem informasi akuntansi publik memerlukan dukungan organisasi yang kolektif, bukan individual (Grabski et al., 2011; Tata Bangun Pramesti et al., 2023).

Hambatan SDM ini juga berdampak pada efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Ketika satu aparatur menguasai hampir seluruh proses pencatatan dan pelaporan, fungsi check and balance antar perangkat desa menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan administratif yang tidak segera terdeteksi, meskipun tidak selalu berimplikasi pada penyimpangan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas yang seimbang merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023; Tede et al., 2024). Untuk memperkuat analisis empiris, berikut disajikan ringkasan data terkait pembagian tugas dan kompetensi aparatur Desa Pelem Watu yang bersumber dari hasil penelitian lapangan, dokumen administrasi desa, dan penelitian terdahulu:

Tabel 3. Hambatan SDM dan Pembagian Tugas dalam Penggunaan SISKEUDES

Aspek yang Dikaji	Temuan Peneliti (Lapangan)	Praktik Administrasi Desa	Temuan Penelitian Terdahulu
Operator SISKEUDES	Terpusat pada Kaur Keuangan	Input dan laporan dikerjakan satu orang	Ketergantungan operator tunggal (Ilham & Lusiani, 2022)
Peran Kepala Desa	Paham alur normatif	Tidak mengoperasikan sistem	Kesenjangan pemahaman teknis (Deviyanti & Hidayati, 2024)
Peran Sekretaris Desa	Memahami administrasi umum	Terbatas pada verifikasi	Kompetensi teknis belum merata (Kindangen et al., 2022)
Dampak pembagian tugas	Beban kerja meningkat	Proses terhambat saat operator bermasalah	Akuntabilitas dipengaruhi SDM (Ikhwan et al., 2024)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada ketiadaan aparatur, melainkan pada distribusi kompetensi yang belum merata. Ketimpangan ini berdampak langsung pada efisiensi kerja dan ketahanan sistem pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas pengambilan keputusan keuangan karena proses administrasi lebih berfokus pada penyelesaian teknis dibanding evaluasi program. Padahal, tata kelola keuangan desa yang baik menuntut keseimbangan antara ketepatan administrasi dan kualitas perencanaan anggaran (Alexandre et al., 2023; Manik et al., 2025).

Hambatan SDM dan pembagian tugas juga berkaitan erat dengan strategi peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama ketika didukung oleh sistem informasi keuangan yang andal (Ikhwan et al., 2024; Firmawati et al., 2025; Muhammad & Limba, 2025). Tanpa pemerataan kompetensi, manfaat SISKEUDES sebagai instrumen penguatan tata kelola keuangan desa tidak dapat dirasakan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian integral dari implementasi sistem.

Pembagian tugas yang proporsional juga berperan dalam menjaga kesinambungan organisasi pemerintahan desa. Aparatur yang memiliki pemahaman lintas fungsi akan lebih adaptif dalam menghadapi perubahan sistem maupun regulasi. Hal ini penting mengingat SISKEUDES dan kebijakan pengelolaan keuangan desa terus mengalami pembaruan seiring dinamika regulasi nasional. Tanpa kesiapan SDM yang merata, desa akan selalu berada pada posisi reaktif terhadap perubahan tersebut (Ulandari & Martiningsih, 2025; Falufi & Rivai, 2025).

Hambatan SDM yang ditemukan dalam penelitian ini juga mencerminkan pentingnya peran pendamping desa dan pemerintah daerah dalam proses penguatan kapasitas aparatur. Pendampingan yang selama ini diberikan cenderung berfokus pada penyelesaian masalah teknis jangka pendek, sementara transfer pengetahuan secara menyeluruh belum berjalan optimal. Padahal, pendamping desa memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh perangkat desa memahami baik aspek teknis maupun regulatif pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Djafarmaku et al. (2025) yang menekankan pengaruh signifikan kompetensi pendamping terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa.

Hambatan SDM dan pembagian tugas dalam penggunaan SISKEUDES menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kapasitas manusia. Sistem informasi yang canggih tidak akan menghasilkan tata kelola keuangan yang berkualitas apabila hanya dikuasai oleh sebagian kecil aparatur. Pembahasan ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas keuangan desa merupakan hasil interaksi antara teknologi, regulasi, dan kompetensi aparatur (Maharani & Akbar, 2020; Martadinata, 2024).

Hambatan SDM dan pembagian tugas di Desa Pelem Watu menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi SISKEUDES. Ketergantungan pada Kaur Keuangan sebagai operator utama, keterbatasan kemampuan teknis pejabat struktural, serta belum meratanya kompetensi aparatur menunjukkan perlunya strategi penguatan kapasitas yang lebih sistematis. Temuan ini memperkaya literatur pengelolaan keuangan desa dengan menempatkan pemerataan kompetensi sebagai prasyarat keberlanjutan sistem informasi keuangan desa. Dengan pembagian tugas yang lebih

proporsional dan peningkatan kapasitas SDM yang terarah, SISKEUDES berpotensi menjadi instrumen yang lebih kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi SISKEUDES di tingkat desa menunjukkan bahwa tata kelola keuangan telah berjalan sesuai kerangka Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih menghadapi tantangan serius pada aspek kompetensi aparatur dan pembagian tugas. Ketergantungan yang tinggi pada Kaur Keuangan sebagai operator utama menciptakan risiko administratif ketika beban kerja meningkat atau terjadi kendala teknis, sementara Kepala Desa dan Sekretaris Desa masih berada pada level pemahaman konseptual tanpa penguasaan operasional aplikasi. Kondisi ini berdampak pada efektivitas, kesinambungan pengelolaan keuangan, serta kualitas akuntabilitas dan transparansi yang ingin dicapai melalui SISKEUDES. Penguatan kapasitas SDM secara merata, pembagian tugas yang lebih adaptif, dan pengelolaan sistem berbasis kolaborasi menjadi kunci agar SISKEUDES tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola keuangan desa yang berkelanjutan dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandre, J. F. X., Taufik, M., & Hidayat, H. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2021. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 201-218. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.982>.
- Deviyanti, N., & Hidayati, C. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:(Studi Kasus Pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 798-807. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2588>.
- Djafarmaku, M. R. R., Kusuma, I. C., & Susandra, F. (2025). Pengaruh Kompetensi Pendamping Desa Dan Penggunaan Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(1), 39-45. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i1.2006>.
- Engle, M. (2015). Book review: Qualitative data analysis: A methods sourcebook: The coding manual for qualitative researchers. <https://doi.org/10.1177/1098214014556146>.
- Falufi, R., & Rivai, F. H. (2025). Strategi Optimalisasi Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Sutusari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor). *Journal of Syntax Literate*, 10(11). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i11.62563>.
- Firmawati, S., Putri, Y. E., & Ramlafatma, R. (2025). Pengaruh aplikasi sistem informasi keuangan desa (siskeudes) dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten sumbawa barat: the influence of the village financial system application (siskeudes) and village apparatus competence on the accountability of village financial management in West Sumbawa Regency. *Ganec Swara*, 19(3), 852-856. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i3.329>.
- Grabski, S. V., Leech, S. A., & Schmidt, P. J. (2011). A review of ERP research: A future agenda for accounting information systems. *Journal of information systems*, 25(1), 37-78. <https://doi.org/10.2308/jis.2011.25.1.37>,
- Ikhwan, F. Y., Dwi Astuti, D., & Rachmawati, L. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ambulu. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 5(2), 121–137. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i2.1298>.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 180-192. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i2.953>.
- Kindangen, R. S., Saerang, D. P., & Budiarso, N. S. (2022). Pengaruh kompetensi, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 13(2), 164-178. <https://doi.org/10.35800/jjs.v13i2.43745>.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1-20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>.

- Manik, A. Z., Nasution, A. I. L., & Nasution, Y. S. J. (2025). Siskeudes for transparency and accountability in village financial management: Siskeudes untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Academia Open*, 10(2), 10-21070. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11494>.
- Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6), 620-624. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106>.
- Muhammad, S. L., & Limba, F. B. (2025). Pengaruh implementasi siskeudes online dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Maluku Tengah. *Jurnal Indovisi*, 7(2), 1-10. <https://doi.org/10.32698/19071208>.
- Setiawan, A., Prihatni, R., & Handarini, D. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(3), 613–625. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.10>.
- Takona, J. P. (2024). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Quality & Quantity*, 58(1), 1011-1013. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2>.
- Tata Bangun Pramesti, Elva Nuraina, & Nur Wahyuning Sulistyowati. (2023). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 293–300. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.278>.
- Tede, R., Budiarso, N. S., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 115-125. <https://doi.org/10.58784/ramp.124>.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596-1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>.
- Ulandari, B. D. U., & Martiningsih, R. S. P. (2025). Penerapan SISKEUDES Berbasis Cash Management System Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 95-107. <https://doi.org/10.51277/keb.v20i1.241>.